



Analisis *Framing* Model Robert N. Entman pada Pemberitaan Larangan Paham Wahabi di Media CNNIndonesia.com dan Detik.com

Ja'is^{1*}, Andhita Risko Faristiana²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author, Email: jaisfaqod@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Framing analysis, Reporting, Wahhabi ideology, Online media

Indonesia is a country with a majority Muslim population adhering to Sunni teachings, while Wahhabism is often regarded as a doctrine that differs in both practice and beliefs. The debate surrounding the acceptance or rejection of Wahhabism has created complex social and religious dynamics. This study is important because media coverage of the Wahhabi prohibition can shape public opinion, create narratives that influence policy decisions, and clarify the positions of various social actors within society. The selection of CNNIndonesia.com and Detik.com as the objects of this research is based on their significant influence in the online journalism landscape in Indonesia, with differing approaches and affiliations. CNNIndonesia.com offers a global perspective through international partnerships, whereas Detik.com is a leading national online news platform with the largest daily readership in Indonesia. Framing analysis of these two media will provide in-depth insights into how the issue of the Wahhabi prohibition is framed in both global and national contexts, as well as its impact on public perception. The aim of this research is to illustrate how both media outlets construct and frame the news about the Wahhabi prohibition using Robert N. Entman's framing concept. The researcher uses a qualitative approach with a framing analysis method, applying a descriptive-comparative research type. The purpose of descriptive-comparative research is to describe the four framing analysis structures found in CNNIndonesia.com and Detik.com, and to compare the ways information is presented between the two media. Data collection methods in this research are carried out through text analysis and documentation. The results show differences in problem definition, approaches to the causes of the problem, moral evaluation, and treatment recommendations. CNN Indonesia highlights the recommendation to prohibit Wahhabism by LD PBNU, including an understanding of Wahhabism and efforts to ban it, while Detik.com emphasizes various responses and reactions from related figures. Framing analysis reveals differences in the emphasis and context of reporting between the two media, with CNN Indonesia focusing more on LD PBNU's clarification, while Detik.com emphasizes the reactions and explanations of related figures.

ABSTRAK

Kata kunci:

Analisis *framing*,
Pemberitaan,
Paham Wahabi,
Media *online*

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang mengikuti ajaran Sunni, sedangkan Wahabi sering dianggap sebagai aliran yang berbeda secara doktrin dan praktik. Perdebatan tentang penerimaan atau penolakan terhadap paham Wahabi telah menciptakan dinamika sosial dan keagamaan yang kompleks. Kajian ini penting karena pemberitaan mengenai larangan Wahabi di media massa dapat membentuk opini publik, menciptakan wacana yang memengaruhi keputusan kebijakan, dan mempertegas posisi berbagai aktor sosial dalam masyarakat. Pemilihan CNNIndonesia.com dan Detik.com sebagai objek penelitian didasarkan pada pengaruh besar keduanya dalam dunia jurnalistik online di Indonesia, dengan pendekatan dan afiliasi yang berbeda. CNNIndonesia.com menghadirkan perspektif global melalui kemitraan internasional, sedangkan Detik.com merupakan media pemberitaan online nasional dengan jumlah pembaca harian yang terbesar di Indonesia. Analisis *framing* pada kedua media ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana isu larangan paham Wahabi dibingkai dalam konteks global dan nasional, serta dampaknya terhadap persepsi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana kedua media mengonstruksi dan membingkai pemberitaan tentang larangan paham Wahabi dengan menggunakan konsep *framing* Robert N. Entman. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing*, serta menerapkan jenis penelitian deskriptif-komparatif. Tujuan dari jenis penelitian deskriptif-komparatif adalah untuk menggambarkan empat struktur analisis *framing* yang terdapat pada media *online* CNNIndonesia.com dan Detik.com, serta membandingkan cara penyajian informasi antara kedua media tersebut. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah teks dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam pendefinisian masalah, pendekatan terhadap penyebab masalah, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan. CNN Indonesia lebih menonjolkan rekomendasi larangan paham Wahabi oleh LD PBNU, termasuk pemahaman paham tersebut dan upaya melarangnya, sementara Detik.com lebih menekankan berbagai tanggapan dan reaksi dari tokoh-tokoh terkait. Analisis *framing* mengungkap perbedaan dalam penekanan dan konteks pemberitaan antara kedua media, dengan CNN Indonesia lebih fokus pada klarifikasi LD PBNU, sementara Detik.com lebih menekankan reaksi dan penjelasan dari tokoh terkait.

Pendahuluan

Salah satu topik yang akhir-akhir ini sangat ramai dan menjadi sorotan utama adalah isu seputar larangan paham Wahabi di Indonesia. Berkembangnya paham Wahabi tersebut banyak mendapatkan pertentangan yang begitu keras dari masyarakat di Nusantara (Hasyim, 2019). Mayoritas masyarakat Nusantara menganut doktrin *Sunni* yang terbentang kuat di tubuh Nahdhatul Ulama (NU), sebuah organisasi yang dibangun oleh Hadrah al-Syakh Hasyim Asy'ari (Farih, 2016). Sedangkan, motif didirikannya NU adalah untuk mempertahankan paham *'Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Fadli & Sudrajat, 2020). Lebih

khususnya, NU membentengi umat Islam agar tetap teguh pada ajaran Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, sehingga tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru yang gemar membid'ahkan dan mengkafirkan saudaranya sendiri, sehingga dengan keberadaan NU ditanamkan konsep *tawassuth* (pertengahan), *tawazun* (proporsional), *ta'adul* (adil), dan *tasamuh* (moderat) (Maulana, 2022). Konsep-konsep NU ini secara tidak langsung mencegah paham-paham radikal yang mulai berkecambah di negara pluralistik Indonesia.

Doktrin-doktrin paham Wahabi yang dianggap tidak selaras dengan kebudayaan bangsa Indonesia ini menimbulkan munculnya isu larangan paham Wahabi di Nusantara. Isu larangan paham Wahabi semakin ramai setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas terkait masalah ini (Imaduddin, 2022). Permintaan PBNU ini muncul sebagai salah satu hasil rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah PBNU yang diselenggarakan di Asrama Haji Jakarta pada tanggal 25-27 Oktober 2022 (Naufal, 2022). Dalam rekomendasi tersebut, Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkumham), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag), untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah (Permana, 2022). Rekomendasi ini mencerminkan keprihatinan serius yang diungkapkan oleh PBNU terhadap dampak dan potensi konflik yang dapat timbul akibat penyebaran paham ini.

Berangkat dari realitas sosial yang disebabkan oleh berkembangnya paham Wahabi di Indonesia dan perdebatan seputar larangan paham ini, banyak dari media pemberitaan atau portal berita *online* telah mempublikasikan dan menyoroti isu-isu terkait dengan ajaran Wahabi. Media ini berfungsi sebagai saluran utama untuk menyampaikan berita, pandangan, dan analisis terkait dengan perkembangan isu ini kepada masyarakat. Peran media ini tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai platform utama yang menghadirkan berita, sudut pandang, dan analisis terkait dengan dinamika perkembangan isu tersebut, memungkinkan masyarakat untuk memahami implikasi yang lebih mendalam dari fenomena ini. Oleh sebab itu, memahami pemberitaan terkait paham Wahabi di Indonesia menjadi hal yang penting.

Media berita *online* seperti CNNIndonesia.com dan Detik.com telah aktif dalam memberitakan berbagai aspek isu larangan paham Wahabi. Mereka menyajikan berita-berita terbaru tentang pernyataan, tindakan, dan rekomendasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam perdebatan ini. Selain itu, media tersebut juga mempublikasikan wawancara dan pendapat pakar-pakar agama, akademisi, serta pemangku kebijakan yang memberikan analisis mendalam tentang dampak dan implikasi dari larangan paham Wahabi. Kedua situs berita ini telah membangun reputasi yang kuat. Karena reputasi yang kuat ini, keduanya memiliki basis pengguna yang besar dan tingkat pengunjung yang tinggi. Dalam melaporkan isu ini, situs-situs berita *online* tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap bagaimana masyarakat memandang dan memahami paham Wahabi. Pengaruh ini bisa timbul secara langsung melalui cara mereka menyusun dan mempresentasikan berita, tetapi juga bisa memengaruhi secara tidak langsung melalui cara mereka mengekspos fakta-fakta terkait.

Berdasarkan hal tersebut, analisis *framing* yang peneliti lakukan khususnya pada situs berita CNNIndonesia.com dan Detik.com, akan memberikan wawasan mendalam tentang cara media *online* memperlakukan dan membingkai isu-isu yang rumit dan kontroversial ini.

Hal ini akan membantu memahami peran media dalam membentuk persepsi masyarakat dan cara media mengartikulasikan isu seputar larangan paham Wahabi di Indonesia.

Pemilihan CNNIndonesia.com sebagai objek penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, CNNIndonesia.com adalah salah satu situs berita terkemuka di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Dalam konteks pemberitaan mengenai larangan paham Wahabi, situs berita ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana isu tersebut di-*frame* dan disajikan kepada pembaca. Kedua, kerjasama CNNIndonesia.com dengan organisasi berita internasional seperti CNN membawa dimensi khusus dalam pbingkai berita. Ini membuka pertanyaan tentang bagaimana kerjasama dengan media internasional memengaruhi cara berita di-*frame* dan diinterpretasikan dalam konteks lokal, terutama dalam hal larangan paham Wahabi. Oleh karena itu, pemilihan CNNIndonesia.com sebagai subjek penelitian dalam konteks analisis *framing* mengenai larangan paham Wahabi di Indonesia sesuai dengan kerangka penelitian yang diajukan, yang memungkinkan analisis yang mendalam tentang cara media *online* membingkai isu tersebut.

Pemilihan Detik.com sebagai objek penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Detik.com merupakan salah satu situs berita terkemuka di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam dunia jurnalistik *online*. Situs ini merupakan media digital penerbit berita nomor satu di Indonesia hingga Bulan September 2023, dengan rata-rata pembaca harian yakni sebanyak 6 hingga 6,5 juta orang. Dengan popularitas dan tingkat kunjungan yang sangat besar, Detik.com memiliki pengaruh yang signifikan dalam menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat Indonesia. Analisis *framing* di situs ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana media berita yang sangat populer memperlakukan dan mengkomunikasikan isu-isu kontroversial seperti larangan paham Wahabi dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat. Kedua, kerjasama dan kemitraan media Detik.com dengan beberapa entitas media besar lain seperti Trans Corp dan kekuatan dalam penyediaan berita sehari-hari membawa dimensi khusus dalam pbingkai berita. Ini membuka pertanyaan tentang bagaimana kerjasama dengan berbagai organisasi media nasional berpengaruh terhadap cara berita di-*frame* dan diinterpretasikan, terutama dalam hal larangan paham Wahabi.

CNNIndonesia.com dan Detik.com memiliki pengaruh besar dalam dunia jurnalistik *online* di Indonesia, namun dengan ideologi dan pendekatan yang berbeda. CNNIndonesia.com, dengan kerjasama dan afiliasi dengan media internasional seperti CNN, cenderung menghadirkan perspektif global dalam pemberitaannya. Hal ini memungkinkan untuk menganalisis bagaimana media internasional dapat memengaruhi pbingkai berita dalam konteks lokal, terutama terkait dengan isu larangan paham Wahabi. Di sisi lain, Detik.com adalah salah satu situs berita terkemuka di Indonesia dengan tingkat kunjungan harian yang terbesar. Media ini mewakili pendekatan dan ideologi berita yang lebih lokal dan nasional, dengan kemitraan dengan entitas media besar nasional. Analisis *framing* di Detik.com dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana media berita nasional yang sangat populer memperlakukan dan mengkomunikasikan isu-isu kontroversial seperti larangan paham Wahabi dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat. Pemilihan kedua media tersebut sebagai objek penelitian memungkinkan analisis *framing* yang komprehensif, mempertimbangkan perspektif global (internasional) dan nasional dalam pbingkai berita mengenai larangan paham Wahabi di Indonesia. Hal ini akan membantu memahami bagaimana media berperan dalam

membentuk pandangan dan pemahaman masyarakat tentang isu yang sensitif dalam hal ini adalah isu larangan paham Wahabi di Indonesia.

Metode Penelitian dan Pendekatan Teori

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis *framing* dan jenis penelitian deskriptif-komparatif. Data untuk analisis diperoleh melalui telaah teks dan dokumentasi dari artikel-artikel yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia dan Detik.com terkait dengan larangan paham Wahabi di Indonesia. Pendekatan analisis *framing* digunakan untuk memahami bagaimana kedua media tersebut membingkai isu tersebut, sementara pendekatan deskriptif-komparatif digunakan untuk membandingkan perbedaan dalam penekanan dan konteks pemberitaan antara keduanya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana media mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu dan bagaimana informasi disajikan dengan cara yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, analisis *framing* akan dilakukan dengan menggunakan model yang mengacu pada teori Robert N. Entman.

CNNIndonesia.com dan Detik.com dipilih sebagai objek penelitian karena keduanya memiliki pengaruh signifikan dalam lanskap media online Indonesia, namun dengan pendekatan dan afiliasi yang berbeda. CNNIndonesia.com, sebagai portal berita terkemuka dengan afiliasi internasional dengan CNN, menawarkan perspektif global dalam pemberitaannya. Kemitraan ini memungkinkan analisis tentang bagaimana sudut pandang internasional memengaruhi *framing* berita tentang larangan paham Wahabi di konteks lokal. Sementara itu, Detik.com, yang merupakan salah satu media berita online nasional dengan jumlah pembaca harian terbesar di Indonesia. Media ini mewakili pendekatan dan ideologi berita yang lebih lokal dan nasional, dengan kemitraan dengan entitas media besar nasional. Media ini memberikan wawasan tentang bagaimana isu yang sama dibingkai dan disampaikan kepada audiens nasional. Dengan membandingkan kedua media ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perbedaan dalam *framing* dan dampaknya terhadap pemahaman publik tentang isu larangan paham Wahabi. Melalui pemilihan kedua media tersebut sebagai objek penelitian, memungkinkan analisis *framing* yang mendalam, dengan mempertimbangkan sudut pandang global (internasional) dan nasional dalam membingkai berita terkait larangan paham Wahabi di Indonesia.

Dalam pendekatan analisis *framing* Robert N. Entman, perangkat *framing* dapat dibagi menjadi empat tahapan, yakni *define problems* (mendefinisikan masalah), *diagnose causes* (mendiagnosis penyebab), *make moral judgement* (membuat penilaian moral), *treatment recommendation* (rekomendasi penanganan) (Eriyanto, 2015). Melalui keempat rangkaian ini, kecenderungan dan kecondongan wartawan dalam mengisahkan peristiwa dapat diamati, sehingga penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana media *online* CNNIndonesia.com dan Detik.com membingkai isu larangan paham Wahabi dalam pemberitaan mereka.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Perbandingan *headline* berita larangan paham Wahabi dari media *online* CNNIndonesia.com dan Detik.com

CNNIndonesia.com	Detik.com
Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Penyebaran Wahabi di RI	Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi- <i>HijrahFest</i>
Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Penyebaran Wahabi di RI	Penjelasan PBNU soal Usulan Agar Pemerintah Larang Wahabi Takfiri
Mengenal Wahabi, Paham yang Diminta Dilarang di RI oleh LD PBNU	Paham Wahabi yang Dilarang NU Teridentifikasi di Tasikmalaya?
PBNU Desak Larang Wahabi, Di Mana Saja Paham Menyebar?	Din Syamsuddin soal Usulan LD PBNU Larang Wahabi Takfiri: Kedepankan Toleransi
LD PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi hingga Festival <i>HijrahFest</i>	Wasekjen: Usulan ke Pemerintah Larang Wahabi Takfiri Belum Resmi dari PBNU
PBNU Klarifikasi soal Larang Wahabi: Yang Beredar di Timur Tengah	PBNU Anulir Rilis LDNU soal Wahabi: Tak Ada Persetujuan Rais Aam-Ketum
Mengapa Paham Wahabi Ditolak di Indonesia?	Respons Ansor Jatim soal Larangan Wahabi di Indonesia
PBNU: Tak Ada Persetujuan Ketum & Rais Aam soal Larangan Wahabi di RI	PWNU Jatim Sentil Kekompakan PBNU soal Gaduh Larangan Wahabi Takfiri
Ketum PBNU Gus Yahya: Larangan Paham Wahabi Belum Resmi	

Dilihat dari *headline* berita, pemberitaan antara CNN Indonesia dan Detik.com mengenai permintaan larangan paham Wahabi oleh Lembaga Dakwah PBNU mencerminkan pendekatan dan fokus yang berbeda. *Pertama*, titik penekanan pada *headline*. CNN Indonesia lebih menekankan pada permintaan langsung LD PBNU kepada pemerintah untuk melarang penyebaran paham Wahabi di Indonesia. *Headline-headline* mereka lebih menyoroti permintaan tersebut secara langsung. Sementara itu, Detik.com lebih menonjolkan variasi reaksi dan penjelasan terkait permintaan larangan paham Wahabi dari tokoh-tokoh terkait. Mereka menyoroti tanggapan dari berbagai pihak serta penjelasan yang diberikan oleh PBNU.

Kedua, fokus liputan yang tergambarkan dari *headline*. CNN Indonesia lebih menonjolkan pemberitaan dengan fokus yang lebih spesifik dan mendalam mengenai isu larangan paham Wahabi oleh PBNU. CNN Indonesia membahas lebih rinci tentang pemahaman paham Wahabi dan upaya PBNU untuk melarangnya. Sementara Detik.com lebih menyoroti berbagai tanggapan dan penjelasan terkait permintaan larangan paham Wahabi dari PBNU. Mereka memberikan liputan yang lebih luas dan mencakup variasi reaksi dari berbagai pihak.

CNN Indonesia lebih terfokus pada rekomendasi larangan paham Wahabi oleh PBNU dan langsung dalam pendekatannya, dengan *headline* yang fokus pada permintaan larangan paham Wahabi oleh LD PBNU. Mereka mengedepankan berita secara langsung tanpa banyak variasi tanggapan. Sementara Detik.com lebih beragam dalam pendekatannya, dengan menampilkan berbagai tanggapan dan penjelasan terkait permintaan tersebut. Detik.com memberikan ruang untuk berbagai sudut pandang dan reaksi yang berbeda.

Analisis *Framing* Model Robert N. Entman pada Pemberitaan Larangan Paham Wahabi di Media CNNIndonesia.com dan Detik.com

Adapun Perbandingan *framing* setiap elemen analisis *framing* Robert N. Entman dalam pemberitaan larangan paham wahabi di media *online* CNNIndonesia.com dan Detik.com dapat dilihat pada tabel dan analisisnya sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan *framing* elemen *define problems* pemberitaan larangan paham wahabi di media *online* CNNIndonesia.com dan Detik.com

Aspek <i>Framing</i>	CNNIndonesia.com	Detik.com
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	1. Menyoroti permintaan LD PBNU kepada pemerintah untuk melarang penyebaran paham Wahabi di Indonesia melalui berbagai saluran komunikasi. (Berita 1) 2. Menyoroti permintaan LD PBNU kepada pemerintah untuk melarang penyebaran paham Wahabi di Indonesia melalui berbagai saluran komunikasi. (Berita 2) 3. Menyoroti permintaan LD PBNU kepada pemerintah untuk melarang penyebaran paham Wahabi di Indonesia melalui berbagai saluran komunikasi. (Berita 3) 4. Menyoroti permintaan dari Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang melarang penyebaran paham Wahabi. (Berita 4) 5. Menyoroti rekomendasi dari LD PBNU untuk mendorong pemerintah membuat regulasi yang menghambat penyebaran paham Wahabi melalui berbagai media dan melarang festival <i>HijrahFest</i> atau <i>HijabFest</i>. (Berita 5) 6. Menyoroti pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi meluruskan salah satu rekomendasi Lembaga Dakwah (LD) PBNU yang meminta pemerintah agar melarang paham Wahabi di Indonesia. (Berita 6) 7. Mengidentifikasi masalah sebagai perbincangan publik seputar mazhab Wahabi setelah PBNU mendesak	1. Menyoroti bahwa Lembaga Dakwah PBNU meminta pemerintah Indonesia untuk melarang penyebaran paham Wahabi dan untuk menghentikan gelaran event <i>HijrahFest</i> atau <i>HijabFest</i>. (Berita 1) 2. Menyoroti permintaan LD PBNU kepada pemerintah Indonesia untuk melarang persebaran paham wahabi salafi takfiri. 3. Menyoroti penyebaran paham Wahabi takfiri, yang diusulkan untuk dilarang oleh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama (NU), mulai muncul di beberapa kawasan di pedalaman dan pesisir pantai Tasikmalaya. 4. Menyoroti <i>statement</i> Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang mengusulkan pendekatan yang lebih toleran dengan mencari jalan tengah dalam menanggapi permintaan LD PBNU untuk melarang persebaran paham wahabi salafi takfiri. (Berita 4) 5. Menyoroti masalah ketidakjelasan mengenai status rekomendasi dari Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait larangan persebaran paham wahabi takfiri kepada pemerintah Indonesia. (Berita 5) 6. Menyoroti ketidaksepakatan internal di kalangan PBNU terkait dengan posisi resmi terhadap larangan

	pemerintah untuk melarang paham tersebut. (Berita 7) 8. Menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, yang menegaskan bahwa rilis hasil rekomendasi Lembaga Dakwah PBNU terkait permintaan pemerintah untuk melarang paham Wahabi belum dikonsultasikan dan disetujui oleh Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, maupun Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf. (Berita 8) 9. Menyoroti pernyataan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, yang menegaskan bahwa rilis hasil rekomendasi Lembaga Dakwah PBNU terkait permintaan pemerintah untuk melarang paham Wahabi belum resmi. (Berita 9)	penyebaran paham Wahabi. (Berita 6) 7. Menyoroti tentang ketidaksesuaian antara pernyataan yang disampaikan oleh Lembaga Dakwah PBNU (LD PBNU) dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, terkait larangan paham Wahabi. (Berita 7) 8. Menyoroti ketidak-kompakan antara Lembaga Dakwah PBNU dan Sekjen PBNU terkait dengan larangan paham Wahabi takfiri. (Berita 8)
--	--	---

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat dianalisis bahwa, terdapat perbedaan dalam pendefinisian masalah antara CNN Indonesia dan Detik.com terkait permintaan LD PBNU untuk melarang penyebaran paham Wahabi di Indonesia. CNN Indonesia cenderung lebih fokus pada aspek permintaan tersebut, menyoroti secara konsisten dalam beberapa berita tentang upaya LD PBNU untuk melarang penyebaran paham Wahabi melalui berbagai saluran komunikasi serta penghentian *event-event* yang terkait, terlihat dari *framing* pemberitaan pertama hingga keempat yang kurang lebih hampir sama. Sementara itu, Detik.com lebih fokus pada respon dan tanggapan terhadap permintaan tersebut, menyoroti variasi pendapat di kalangan tokoh-tokoh agama dan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan di dalam PBNU. Detik.com juga lebih mendetail dalam menjelaskan ketidaksesuaian antara pernyataan dari tokoh-tokoh dalam organisasi, serta ketidak-kompakan antara LD PBNU dan Sekjen PBNU terkait larangan paham Wahabi takfiri.

Tabel 3. Perbandingan *framing* elemen *diagnose causes* pemberitaan larangan paham wahabi di media online CNNIndonesia.com dan Detik.com

Aspek Framing	CNNIndonesia.com	Detik.com
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	1. Menyoroti bahwa rekomendasi untuk melarang penyebaran paham Wahabi berasal dari Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah PBNU pada Oktober 2022. (Berita 1) 2. Menyoroti bahwa rekomendasi untuk melarang penyebaran paham Wahabi berasal dari Rapat Kerja	1. Menyoroti bahwa rekomendasi dari Lembaga Dakwah PBNU dilatarbelakangi oleh kerapnya tuduhan <i>bid'ah</i> dan pengkafiran yang dilontarkan oleh kelompok yang mengikuti paham Wahabi terhadap tradisi keagamaan mayoritas umat Islam. (Berita 1) 2. Menyoroti pandangan LD PBNU yang menjelaskan bahwa penganut paham Wahabi Takfiri

	Nasional Lembaga Dakwah PBNU pada Oktober 2022. (Berita 2) 3. Menyoroti pandangan LD PBNU terhadap paham Wahabi sebagai penyebab potensial radikalisme dan terorisme, serta pandangan mereka bahwa paham ini dapat mengancam stabilitas sosial dan nilai-nilai Pancasila dan NKRI. (Berita 3) 4. Menyoroti bahwa permintaan tersebut merupakan hasil rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah PBNU, yang digelar pada 25-27 Oktober 2022. (Berita 4) 5. Menyoroti bahwa permintaan tersebut merupakan hasil rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah PBNU, yang digelar pada 25-27 Oktober 2022. (Berita 5) 6. Menyoroti pendapat Gus Fahrur yang mengatakan bahwa paham Wahabi yang direkomendasikan dilarang oleh LD PBNU bukan semua paham Wahabi, melainkan paham Wahabi yang takfiri yang kerap dijadikan ideologi kekerasan ISIS. (Berita 6) 7. Menyoroti rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah PBNU yang merekomendasikan agar pemerintah membuat regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah (Berita 7) 8. Menyoroti pernyataan Saifullah Yusuf yang menyatakan bahwa rilis Lembaga Dakwah PBNU dianggap kontraproduktif dan tidak konsultatif dengan PBNU, khususnya dengan	sering mengkafirkan sesama Muslim karena perbedaan keyakinan keagamaan. (Berita 2) 3. Menyoroti <i>statement</i> Dudu Rohman Kepala kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya bahwa penyebab utama masalah ini, adalah belum adanya aturan yang memungkinkan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya untuk melarang penyebaran paham Wahabi takfiri. (Berita 3) 4. Menyoroti pernyataan Din Syamsuddin yang berpendapat bahwa penyebab masalah adalah sikap kurangnya bermusyawarah sebagai alternatif yang lebih baik daripada menyalahkan pihak lain. (Berita 4) 5. Menyoroti pernyataan Rahmat Hidayat Pulungan selaku Wasekjen PBNU yang menyebutkan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga, badan otonom NU, dan yang mengatasnamakan NU sebelum diratifikasi dalam rapat PBNU tidak dapat dianggap resmi. (Berita 5) 6. Menyoroti pernyataan Gus Ipul yang menyatakan bahwa pernyataan Lembaga Dakwah PBNU kontraproduktif dan menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat. (Berita 6) 7. Memperkirakan penyebab masalah, disebutkan bahwa pernyataan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, yang meluruskan pernyataan LD PBNU disebabkan oleh ketidaksesuaian antara posisi Sekjen dengan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU terkait larangan paham Wahabi. (Berita 7) 8. Menyoroti ungkapan Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib tentang kurangnya koordinasi dan
--	--	--

	Rais Aam dan Ketua Umum. (Berita 8) 9. Menyoroti pernyataan Gus Yahya yang menyatakan pembicaraan mengenai larangan paham Wahabi masih belum menjadi sikap resmi karena belum melalui proses resmi dari PBNU. (Berita 9)	kesolidan di antara pengurus PBNU yang dianggap sebagai penyebab utama dari masalah yang dihadapi. (Berita 8)
--	---	---

Berdasarkan analisis terhadap "*Diagnose Causes*" (Pendefinisian Masalah) dari berita yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia dan Detik.com, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan fokus pada penyebab masalah terkait larangan penyebaran paham Wahabi. CNN Indonesia cenderung menyoroti aspek internal organisasi Islam, khususnya PBNU, sebagai sumber utama masalah. Berita-berita yang diterbitkan oleh CNN Indonesia menunjukkan bahwa rekomendasi untuk melarang penyebaran paham Wahabi berasal dari Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah PBNU pada Oktober 2022. Fokus pemberitaan CNN Indonesia lebih pada proses dan keputusan internal organisasi, serta respons terhadap rekomendasi tersebut. Berita-berita tersebut juga menyoroti pandangan LD PBNU terhadap paham Wahabi sebagai penyebab potensial radikalisme dan terorisme.

Sementara itu, Detik.com lebih menekankan pada beragam penyebab masalah yang lebih luas, termasuk faktor internal dan eksternal. Detik.com menyoroti bahwa rekomendasi dari Lembaga Dakwah PBNU dipicu oleh sikap intoleransi dan ekstremisme dalam menghadapi perbedaan keyakinan agama, serta kurangnya regulasi yang efektif dalam menangani penyebaran paham Wahabi takfiri. Selain itu, Detik.com juga menyoroti kurangnya konsistensi dalam komunikasi yang dikeluarkan oleh LD PBNU dan kurangnya keselarasan di antara pengurus PBNU.

Secara umum, CNN Indonesia lebih berfokus pada aspek internal organisasi NU sementara Detik.com lebih menyoroti faktor internal dan eksternal yang lebih luas dalam menyebabkan masalah terkait larangan penyebaran paham Wahabi. Faktor eksternal yang ditunjukkan oleh Detik.com salah satunya adalah ditunjukkan dengan pemberitaan ke-6 Detik.com yang meminta pandangan tokoh dari luar NU, yakni Din Syamsuddin mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Tabel 4. Perbandingan *framing* elemen *make moral judgement* pemberitaan larangan paham wahabi di media *online* CNNIndonesia.com dan Detik.com

Aspek Framing	CNNIndonesia.com	Detik.com
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Penilaian Moral)	1. Menyoroti penilaian LD PBNU bahwa paham Wahabi menyalahkan tradisi keagamaan mayoritas umat Islam di Indonesia, bisa menyebabkan konflik, perpecahan, radikalisme, dan terorisme, dan oleh karena itu penting untuk menghentikan penyebarannya. (Berita 1) 2. Menyoroti sudut pandang LD PBNU yang menilai bahwa	1. Menyoroti pernyataan LD PBNU yang menilai paham Wahabi dapat memicu konflik sosial dan bahkan berpotensi menyebabkan terorisme. Mereka menganggap penting untuk mengambil tindakan mengingat potensi dampak negatifnya. (Berita 1)

	paham Wahabi sering menuduh <i>bid'ah</i> dan bahkan menyatakan kafir terhadap tradisi Islam mayoritas di Indonesia, juga sebagai embrio dari radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. (Berita 2) 3. Menyoroti pandangan moral terkait paham Wahabi yang menolak praktik-praktik keagamaan lainnya, menekankan keesaan Tuhan, dan menilai ajaran lain sebagai <i>bid'ah</i>, dengan implikasi terhadap toleransi antarumat beragama di Indonesia. (Berita 3) 4. Menyoroti pandangan moral dari LD PBNU terhadap paham Wahabi, yang menolak praktik-praktik seperti mengunjungi makam dan memuliakan orang suci, serta menekankan pentingnya kembali ke ajaran asli Islam. (Berita 4) 5. Menyoroti pandangan LD PBNU tentang paham Wahabi yang menuduh <i>bid'ah</i> dan bahkan mengafirkan tradisi mayoritas umat Islam di Indonesia, serta melihatnya sebagai embrio dari radikalisme dan terorisme. LD PBNU juga menyoroti ketidaksesuaian paham Wahabi dengan upaya pemerintah dalam mempromosikan moderasi beragama. (Berita 5) 6. Menyoroti pernyataan Gus Fahrur yang menegaskan bahwa Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, selalu mengadvokasi misi Islam Aswaja yang inklusif dan damai, memuliakan manusia sebagai sederajat, dan menekankan pentingnya konsensus atas nilai-nilai yang perlu disepakati. (Berita 6) 7. Menyoroti pernyataan dari Sya'roni Rofii seorang pakar kajian Timur Tengah yang menyampaikan pandangan bahwa paham Wahabi sulit diterima di Indonesia karena	2. Menyoroti ungkapan Gus Fahrur yang menyatakan bahwa paham Wahabi Takfiri merupakan paham intoleran yang melarang beberapa tradisi keagamaan seperti ziarah kubur. (Berita 2) 3. Menyoroti <i>statement</i> Dudu Rahman Kepala kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan bahwa penganut paham Wahabi takfiri dianggap intoleran karena sering mengafirkan sesama muslim yang memiliki pendapat agama yang berbeda. (Berita 3) 4. Menyoroti pernyataan Din Syamsuddin yang menekankan pentingnya mengedepankan toleransi, tasamuh, dan <i>syuro</i> dalam menghadapi perbedaan pemahaman agama. (Berita 4) 5. Menyoroti rekomendasi dari Lembaga Dakwah PBNU didasarkan pada penilaian bahwa paham wahabi takfiri seringkali melontarkan tuduhan <i>bid'ah</i> dan pengkafiran. (Berita 5) 6. Menyoroti pernyataan Gus Ipul bahwa rekomendasi dari LDNU, karena tidak mendapatkan persetujuan PBNU, harus diabaikan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang sah atau keputusan resmi dari perkumpulan. (Berita 6) 7. Menyoroti pernyataan Gus Fawait dari PW GP Ansor Jatim yang menilai bahwa ajaran Wahabi takfiri banyak dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan
--	--	--

	kurangnya akulturasi dengan budaya lokal dan nilai Islam yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. (Berita 7) 8. Menyoroti pernyataan Gus Ipul akan pentingnya konsultasi dan persetujuan dari pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama (PBNU), yaitu Rais Aam dan Ketua Umum, dalam pengambilan keputusan resmi terkait penyebaran informasi. (Berita 8) 9. Menyoroti pernyataan Gus Yahya bahwa meskipun menyatakan bahwa pembicaraan belum resmi, Gus Yahya tidak menampik bahwa perbedaan antara kelompok agama memang perlu dibahas dan dipertimbangkan agar tidak menyulut pertentangan. (Berita 9)	dianggap sebagai ancaman terhadap pemersatu bangsa. (Berita 7) 8. Menyoroti <i>statement</i> Gus Salam, wakil ketua PWNU Jatim yang menyatakan bahwa paham Wahabi cukup mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai karena memberikan doktrin anti-NKRI kepada pengikutnya, yang dapat mengancam kesatuan dan keutuhan NKRI. (Berita 8)
--	--	--

Dalam liputan kedua media terhadap isu penyebaran paham Wahabi, CNN Indonesia dan Detik.com menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam membuat penilaian moral terhadap fenomena tersebut. CNN Indonesia lebih berfokus pada sudut pandang internal organisasi Islam, khususnya PBNU, dalam mengevaluasi dampak dan implikasi paham Wahabi. Mereka menyoroti penilaian moral LD PBNU bahwa paham Wahabi dapat menyebabkan konflik, radikalisme, dan perpecahan dalam masyarakat, serta menekankan pentingnya menghentikan penyebarannya untuk menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai Pancasila. CNN Indonesia juga menunjukkan penilaian moral terhadap praktik-praktik keagamaan yang ditolak oleh paham Wahabi, menekankan pentingnya kembali ke ajaran asli Islam. Di sisi lain, Detik.com menyoroti penilaian moral dari berbagai pihak, termasuk LD PBNU, tokoh agama dari organisasi lain yakni Muhammadiyah, serta menekankan dampak negatif paham Wahabi terhadap toleransi antarumat beragama, stabilitas sosial, dan keutuhan negara. Detik.com juga menunjukkan kekhawatiran akan intoleransi, ekstremisme, dan potensi terorisme yang mungkin timbul dari penyebaran paham Wahabi. Selain itu, Detik.com juga menyoroti implikasi politik dan kebangsaan dari penyebaran paham Wahabi, dengan menekankan nilai-nilai Pancasila dan kesatuan NKRI serta nilai-nilai inklusifitas, toleransi, dan persetujuan dalam menghadapi perbedaan pemahaman agama. Dengan demikian, meskipun keduanya mengevaluasi isu tersebut dari sudut pandang moral, CNN Indonesia lebih terfokus pada perspektif internal organisasi Islam, sedangkan Detik.com lebih menekankan perspektif yang lebih luas dan implikasinya terhadap masyarakat dan negara, dengan melibatkan pendapat dari tokoh eksternal NU yakni tokoh Muhammadiyah.

Tabel 5 Perbandingan *framing* elemen *treatment recommendation* pemberitaan larangan paham wahabi di media *online* CNNIndonesia.com dan Detik.com

Aspek Framing	CNNIndonesia.com	Detik.com
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi Penanganan)	1. Menyoroti rekomendasi penting dari mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj, tentang penanganan paham Wahabi di Indonesia, menekankan perlunya kesadaran bersama untuk menghadapi dan memberantas terorisme serta radikalisme dengan fokus pada pencegahan dan mencabut akar permasalahannya. (Berita 1) 2. Menyoroti rekomendasi LD PBNU kepada pemerintah untuk melibatkan lembaga dalam menyusun materi dan kurikulum dakwah serta kajian keislaman di masjid-masjid perkantoran, dengan kesediaan mendelegasikan para ustadz dan mubaligh. (Berita 2) 3. Menyoroti usulan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai bahwa paham Wahabi dan Salafi tidak sesuai dengan ajaran Islam di Indonesia, dan mengusulkan agar paham tersebut lebih baik berkembang di luar negeri, menekankan perlunya perhatian pemerintah terhadap penyebaran paham Wahabi dan Salafi di Indonesia. (Berita 3) 4. Menyoroti rekomendasi dan pernyataan dari LD PBNU kepada pemerintah untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabi. (Berita 4) 5. Menyoroti rekomendasi LD PBNU agar pemerintah melibatkan mereka dalam menyusun materi dan kurikulum keagamaan di masjid-masjid perkantoran, serta menolak izin kegiatan yang menentang NKRI dan	1. Menyoroti rekomendasi LD PBNU kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang melarang penyebaran paham Wahabi, baik melalui berbagai media. Selain itu, LD PBNU juga merekomendasikan agar pemerintah melarang penyelenggaraan <i>event</i> yang menentang Pancasila dan NKRI, seperti <i>HijrahFest</i> atau <i>HijabFest</i>. (Berita 1) 2. Menyoroti <i>statement</i> Gus Fahrur yang menyarankan agar organisasi Islam di Indonesia, seperti PBNU dan Muhammadiyah, mempromosikan ajaran Islam yang moderat dan saling menghormati pandangan keagamaan yang berbeda. (Berita 2) 3. Menyoroti pernyataan Dudu Rahman Kepala kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang meminta masyarakat untuk menjaga toleransi dan moderasi dalam kehidupan beragama. (Berita 3) 4. Menyoroti pernyataan Din Syamsuddin yang merekomendasikan pendekatan musyawarah sebagai solusi yang lebih baik. (Berita 4) 5. Menyoroti pernyataan Rahmat Hidayat Pulungan selaku Wasekjen PBNU yang menegaskan bahwa tanggung jawab untuk melakukan komunikasi strategis dengan pihak eksternal berada di tangan Pengurus Harian PBNU. (Berita 5)

	Pancasila seperti <i>HijrahFest</i> atau <i>HijabFest</i>. (Berita 5) 6. Menyoroti pernyataan yang disampaikan Gus Fahrur bahwa PBNU akan tetap menjalin hubungan baik dengan semua ormas Islam moderat, baik di tingkat nasional maupun internasional, (Berita 6) 7. Menyoroti pernyataan Sya'roni seorang pakar kajian Timur Tengah yang menyatakan bahwa sejauh ini pemerintah Indonesia belum memberlakukan larangan spesifik terhadap paham Wahabi. Namun, jika ada larangan, biasanya ditujukan kepada pendakwah yang dianggap memicu konflik horizontal antar umat beragama. (Berita 7) 8. Menyoroti pernyataan Gus Ipul yang menjelaskan bahwa PBNU telah mengeluarkan instruksi khusus terkait pedoman penyampaian informasi publik kepada semua lembaga, badan otonom, dan badan khusus di bawah PBNU. (Berita 8) 9. Menyoroti pernyataan Gus Yahya yang menyatakan bahwa kemungkinan pembahasan paham Wahabi dalam forum R20, yang melibatkan para tokoh agama, sekte, dan aliran kepercayaan dari berbagai dunia. (Berita 9)	6. Menyoroti pernyataan Gus Ipul bahwa PBNU telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh lembaga, badan khusus, dan badan otonom untuk melaporkan hasil permusyawaratan kepada pimpinan PBNU sebelum mengambil keputusan strategis atau membuat pernyataan yang bersifat strategis, terutama dalam urusan agama. (Berita 6) 7. Menyoroti pernyataan Gus Fawait yang mewakili PW GP Ansor Jatim yang menyatakan kesiapannya untuk menjalankan instruksi apapun dari PBNU terkait larangan paham Wahabi. (Berita 7) 8. Menyoroti pernyataan Gus Salam yang menyarankan perlunya kajian mendalam terkait rekomendasi LD PBNU kepada pemerintah untuk melarang paham Wahabi, serta perlunya dukungan dari Rais Aam dan Ketua Umum agar rekomendasi tersebut dapat disetujui secara resmi. (Berita 8)
--	---	--

Berdasarkan tabel 5 tersebut, meskipun kedua media tersebut memberikan perhatian pada rekomendasi dari tokoh-tokoh terkemuka, termasuk tokoh agama dan pemerintah, pada elemen *treatment recommendation* ini, Detik.com cenderung lebih banyak menyoroti rekomendasi dari tokoh internal PBNU, meskipun terdapat satu berita yang secara khusus menyoroti pendapat dari tokoh luar NU yakni Din Syamsudin. Sementara CNN Indonesia selain menyoroti *statement* tokoh internal NU, juga mencakup pandangan dari pakar kajian Timur Tengah dan tokoh pemerintah. Detik.com cenderung lebih fokus pada pandangan dan rekomendasi dari tokoh internal PBNU dan organisasi Islam lainnya, seperti Gus Fahrur, Gus Ipul, Gus Fawait, Gus Salam, yang merupakan bagian dari struktur kelembagaan NU Indonesia. Di sisi lain, CNN Indonesia lebih beragam dengan mencakup pandangan dari tokoh mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj, serta dari tokoh eksternal seperti Menko

Polhukam Mahfud MD dan pakar kajian Timur Tengah, Sya'roni. Partisipasi tokoh pemerintah dan pakar kajian Timur Tengah dalam liputan CNN Indonesia memberikan dimensi tambahan pada cakupan dan analisis terhadap isu penyebaran paham Wahabi. Keterlibatan tokoh pemerintah seperti Menko Polhukam Mahfud MD memberikan perspektif dari sudut pandang kebijakan dan penanganan dari pemerintah, sementara pandangan dari pakar kajian Timur Tengah seperti Sya'roni memberikan wawasan lebih mendalam terkait aspek budaya dan historis yang mendasari isu tersebut. Dengan demikian, pada elemen ini (*treatment recommendation*) dengan melibatkan tokoh-tokoh eksternal tersebut membantu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada pembaca, memperkaya liputan dan analisis yang disajikan oleh CNNIndonesia.com.

Selain perbedaan berdasar analisis 4 elemen di atas, peneliti juga mendapatkan temuan lain yakni, pada awalnya kedua media baik CNNIndonesia.com dan Detik.com, menekankan pada aspek yang sama yakni rekomendasi larangan penyebaran paham Wahabi yang disampaikan oleh Lembaga Dakwah PBNU kepada pemerintah. *Framing-framing* awal dari keduanya menyoroti permintaan tersebut secara langsung, mencatat desakan dari LD PBNU kepada pemerintah untuk mengambil tindakan larangan terhadap penyebaran paham Wahabi di Indonesia. Namun, ketika berita-berita selanjutnya dipublikasikan, terjadi pergeseran fokus pemberitaan. Kedua media baik CNNIndonesia.com dan Detik.com melakukan pergeseran fokus pemberitaan yang sama terkait isu ini.

Pada berita-berita selanjutnya, kedua media mulai menyoroti perbedaan pendapat atau sikap di dalam internal PBNU maupun tokoh-tokoh lain terkait dengan rekomendasi larangan paham Wahabi tersebut. Detik.com, misalnya, menggarisbawahi adanya penjelasan, respons, dan analisis yang lebih mendalam terkait usulan larangan tersebut. Media tersebut mencatat perbedaan pendapat atau klarifikasi dari tokoh-tokoh di dalam PBNU misalnya Gus Fahrur, Gus Ipul, Gus Fawait, Gus Salam, yang menunjukkan adanya ketidaksepakatan atau kompleksitas dalam keputusan rekomendasi larangan paham Wahabi oleh Lembaga Dakwah PBNU tersebut.

Sementara itu, CNNIndonesia.com juga mencatat perbedaan pendapat atau penjelasan internal dalam PBNU terkait dengan rekomendasi larangan paham Wahabi. Beberapa *framing* berita menyoroti klarifikasi atau respons yang lebih terperinci dari tokoh-tokoh di dalam PBNU, yang menunjukkan bahwa pendapat dalam lembaga tersebut tidaklah homogen terkait dengan keputusan larangan paham Wahabi. Dengan demikian, pergeseran fokus pemberitaan dari kedua media ini menunjukkan adanya kesamaan dalam mem-*framing* pandangan dan pendapat di antara tokoh-tokoh PBNU dan tokoh-tokoh lain setelah munculnya isu larangan paham Wahabi. Hal ini kemudian menjadi sorotan utama dalam pemberitaan kedua media tersebut, dan mencerminkan bagaimana kedua media tersebut mem-*framing* pemberitaan mereka yang pada awalnya fokus pada rekomendasi larangan penyebaran paham Wahabi yang disampaikan oleh Lembaga Dakwah PBNU, menjadi perdebatan internal di PBNU mengenai keputusan tersebut.

Penutup

Pemberitaan mengenai larangan paham Wahabi di CNNIndonesia.com dan Detik.com tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ideologi media, kelompok kepentingan, dan afiliasi yang melingkupi kedua platform tersebut. CNNIndonesia.com cenderung lebih fokus pada permintaan resmi LD PBNU untuk melarang penyebaran paham Wahabi, dengan penekanan pada aspek internal organisasi Islam, terutama PBNU, sebagai aktor utama dalam masalah ini. *Framing* pemberitaan CNNIndonesia.com secara konsisten menyoroti dampak negatif

paham Wahabi dari sudut pandang PBNU, seperti potensi radikalisme dan ancaman terhadap stabilitas sosial. Di sisi lain, Detik.com lebih berfokus pada reaksi dan tanggapan berbagai tokoh masyarakat, serta menggarisbawahi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan di dalam PBNU. Detik.com juga menjelaskan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan masalah ini, memberikan pandangan yang lebih luas. Analisis *framing* ini mengungkap bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai realitas sesuai dengan ideologi, afiliasi, dan kelompok kepentingan yang memengaruhi mereka. CNNIndonesia.com lebih mendukung pandangan lembaga-lembaga keagamaan besar, sementara Detik.com mencoba memberikan pandangan yang lebih luas dengan menyoroti aspek-aspek lain yakni dengan menyoroti pendapat-pendapat tokoh lokal. Fenomena ini mencerminkan keterkaitan antara ideologi media, agenda *setting*, dan *framing* dalam membentuk wacana publik.

Daftar Pustaka

- Azmi, Faiq. "PWNU Jatim Sentil Kekompakan PBNU soal Gaduh Larangan Wahabi Takfiri", 2022. Retrieved from <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6382382/pwnu-jatim-sentil-kekompakan-pbnu-soal-gaduh-larangan-wahabi-takfiri/amp>
- Azmi, Faiq. "Respons Ansor Jatim soal Larangan Wahabi di Indonesia", 2022. Retrieved from <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6380791/respons-ansor-jatim-soal-larangan-wahabi-di-indonesia>
- CNNIndonesia.com "Ketum PBNU Gus Yahya: Larangan Paham Wahabi Belum Resmi", 2022. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221102122558-20-868478/ketum-pbnu-gus-yahya-larangan-paham-wahabi-belum-resmi/amp>
- CNNIndonesia.com "LD PBNU Harap Pemerintah Larang Wahabi: Banyak di Masjid Kantor", 2022. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028063033-20-866380/ld-pbnu-harap-pemerintah-larang-wahabi-banyak-di-masjid-kantor>
- CNNIndonesia.com "LD PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi hingga Festival *HijrahFest*", 2022. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028202533-20-866784/ld-pbnu-minta-pemerintah-larang-wahabi-hingga-festival-hijrahfest/amp>
- CNNIndonesia.com "Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Penyebaran Wahabi di RI", 2022. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221027191518-20-866306/lembaga-dakwah-pbnu-minta-pemerintah-larang-penyebaran-wahabi-di-ri/amp>
- CNNIndonesia.com "Mengapa Paham Wahabi Ditolak di Indonesia?", 2022. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221101073232-106-867829/mengapa-paham-wahabi-ditolak-di-indonesia>
- CNNIndonesia.com "Mengenal Wahabi, Paham yang Diminta Dilarang di RI oleh LD PBNU", 2022. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028102127-20-866475/mengenal-wahabi-paham-yang-diminta-dilarang-di-ri-oleh-ld-pbnu>
- CNNIndonesia.com "PBNU Desak Larang Wahabi, Di Mana Saja Paham Menyebar?", 2022. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221028101543-106-866471/pbnu-desak-larang-wahabi-di-mana-saja-paham-menyebar/2>
- CNNIndonesia.com "PBNU Klarifikasi soal Larang Wahabi: Yang Beredar di Timur Tengah", 2022. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221031131708-20-867500/pbnu-klarifikasi-soal-larang-wahabi-yang-beredar-di-timur-tengah>
- CNNIndonesia.com "PBNU: Tak Ada Persetujuan Ketum & Rais Aam soal Larangan Wahabi di RI", 2022. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221101065251-20-867818/pbnu-tak-ada-persetujuan-ketum-raais-aam-soal-larangan-wahabi-di-ri>
- Eriyanto. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Yayasan LKIS. 2019.

- Fadli, M. R., & Sudrajat, A. (2020). Keislaman dan Kebangsaan: Telaah Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18(1), 109–130. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3433>
- Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 251–284. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>
- Fikri. *Jurnalisme Kontekstual*. Malang: UB Press. 2016.
- Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. *Komunikasi Massa*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media. 2021.
- Hasyim, A. "Kritik Terhadap Teologi Wahabiyyah di Indonesia dalam Pemikiran Said Aqil Siradj". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Imaduddin, A. H. (2022). "Lembaga Dakwah PBNU Larang Paham Wahabi, Sebab.", 2022. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1652241/lembaga-dakwah-pbnu-larang-paham-wahabi-sebab>
- Junaedi, F. *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Komara, Indra. "PBNU Anulir Rilis LDNU soal Wahabi: Tak Ada Persetujuan Rais Aam-Ketum", 2022. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6380544/pbnu-anulir-rilis-ldnu-soal-wahabi-tak-ada-persetujuan-rais-aam-ketum>
- Medistiara, Yulida. "Penjelasan PBNU soal Usulan Agar Pemerintah Larang Wahabi Takfiri", 2022. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6378089/penjelasan-pbnu-soal-usulan-agar-pemerintah-larang-wahabi-takfiri>
- Medistiara, Yulida. "Wasekjen: Usulan ke Pemerintah Larang Wahabi Takfiri Belum Resmi dari PBNU", 2022. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6380161/wasekjen-usulan-ke-pemerintah-larang-wahabi-takfiri-belum-resmi-dari-pbnu>
- Naufal, Ibnu. "LD PBNU Minta Pemerintah Larang Paham Wahabi", 2022. Retrieved from <https://www.inilah.com/ld-pbnu-minta-pemerintah-larang-paham-wahabi>
- Permana, Fuji E. "Lembaga Dakwah PBNU Rekomendasikan Pemerintah Buat Regulasi Larang Penyebaran Wahabi", 2022. Retrieved from <https://khazanah.republika.co.id/berita/rkez430/lembaga-dakwah-pbnu-rekomendasikan-pemerintah-buat-regulasi-larang-penyebaran-wahabi>
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh. "Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest ", 2022. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6375058/lembaga-dakwah-pbnu-minta-pemerintah-larang-wahabi-hijrahfest>
- Rahadian, Deden. "Paham Wahabi yang Dilarang NU Teridentifikasi di Tasikmalaya?", 2022. Retrieved from <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6379311/paham-wahabi-yang-dilarang-nu-teridentifikasi-di-tasikmalaya>
- Sari, Brigitta Belia Permata. "Din Syamsuddin soal Usulan LD PBNU Larang Wahabi Takfiri: Kedepankan Toleransi", 2022. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6380077/din-syamsuddin-soal-usulan-ld-pbnu-larang-wahabi-takfiri-kedepankan-toleransi>
- Sihabudin, A. *Komunikasi Antarbudaya: Satu Perspektif Multidemensi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Shidqi, A. (2013). Respon Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Wahabisme dan Implikasinya bagi Deradikalisasi Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 109–130. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.109-130>
- Sobur, A.. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.